REVITALISASI LEMBAGA PENDIDIKAN KRISTEN DALAM DUNIA PENDIDIKAN

(Studi dari Yayasan PSAK Semarang dalam Menyelenggarakan Pendidikan Sebagai Lembaga Kristen)

OLEH:
ANDRIAS OKTAVIANTO
NIM: 50120331

TESIS UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT DALAM MENCAPAI GELAR PASCASARJANA PADA FAKULTAS TEOLOGI UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

©UKDW

REVITALISASI LEMBAGA PENDIDIKAN KRISTEN DALAM DUNIA PENDIDIKAN

(Studi dari Yayasan Pengampu Sekolah dan Asrama Kristen Semarang dalam Menyelenggarakan Pendidikan Sebagai Lembaga Kristen)

TESIS

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS TEOLOGI UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA YOGYAKARTA SEBAGAI SALAH SATU SYARAT KELULUSAN UNTUK MEMPEROLEH GELAR MAGISTER SAINS TEOLOGI

©UKDW

ANDRIAS OKTAVIANTO
NIM: 50120331

PROGRAM PASCA SARJANA S-2 ILMU TEOLOGI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA, JANUARI 2006

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul:

REVITALISASI LEMBAGA PENDIDIKAN KRISTEN DALAM DUNIA PENDIDIKAN

(Studi dari Yayasan Pengampu Sekolah dan Asrama Kristen Semarang dalam Menyelenggarakan Pendidikan Sebagai Lembaga Kristen)

Oleh: Andrias Oktavianto

NIM: 50120331

Telah diajukan dan dipertahankan dalam ujian tesis Program Studi S-2 Ilmu Teologi Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana yang dilaksanakan oleh dewan dosen penguji dan dinyatakan DITERIMA untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Sains Teologi, pada tanggal 28 Januari 2016

Pembimbing:

Pdt. Budyanto, Th.D

Dewan Dosen Penguji:

1. Pdt. Budyanto, Th.D
2. Pdt. Dr. Djoko Prasetyo Adi Wibowo
3. Pdt. Dr. Wahyu Nugroho, M.A

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Teologi
Universitas Kristen Duta Wacana

Pdt. Handi Hadiwitanto, Ph.D

DUTA WACANA
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA PROGRAM PASCASARJANA YOGYAKARTA
©UKDW

KATA PENGANTAR

Syukur Penulis naikkan kepada Tuhan Yesus atas kesempatan menempuh studi di Program Studi S-2 Ilmu Teologi Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana selama beberapa tahun ini dan juga kesempatan membuat penelitian yang hasilnya tertuang dalam tesis ini. Kiranya karya tulis ini bermanfaat untuk memperkaya pengetahuan tentang bagaimana merevitalisasi lembaga pendidikan Kristen dalam dunia pendidikan.

Ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada bapak Pdt. Budyanto, Th.D yang telah memberikan pendampingan hingga karya tulis ini dapat terselesaikan dan dapat tersaji seperti sekarang ini. Terima kasih Penulis sampaikan terutama atas kesabaran dan kemurahan beliau yang luar biasa dalam memberikan pembimbingan kepada saya yang kadang melewatkan banyak kesempatan yang telah disediakan. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada semua pihak dalam lingkup Yayasan Pengampu Sekolah dan Asrama Kristen Masehi Semarang yang telah memberikan ruang yang sangat terbuka bagi penelitian saya ini. Tanpa kesempatan tersebut, Penulis belum tentu dapat membuat karya tulis, yaitu tesis ini dengan baik.

Syukur pula saya sampaikan kepada Majelis dan jemaat GKJ Ungaran yang telah memberikan kelonggaran untuk tidak berpelayanan secara penuh selama studi beberapa tahun ini dan tentunya beserta dukungan berupa pembiayaan yang telah disediakan. Besar harapan Penulis, kiranya ilmu yang Penulis dapat, ada manfaatnya untuk mengembangkan pelayanan di dalamnya. Demikian pula kepada semua pihak yang tak dapat Penulis sebutkan satu per satu dalam dalam bagian pengantar ini.

Dan akhirnya dan terutama terima kasih kepada keluarga, yaitu orangtua, anak-anak dan istri yang telah merelakan diri untuk “ditinggal” dalam studi Penulis ini. Dalam hal ini terima kasih pula kepada istri tercinta atas “cerewetannya”, yang mendorong dan menyemangati Penulis untuk segera menyelesaikan setiap tugas, termasuk tesis ini pada waktunya. Demikian beberapa hal yang ingin Penulis ungkapkan. Terima kasih dan kiranya Tuhan yang Mahamurah senantiasa memberkati.

Yogyakarta, 29 Pebruari 2016

Andrias Oktavianto

©UKDW

DAFTAR ISI

Cover i

Halaman Pengesahan ii

Kata Pengantar iii

Daftar Isi iv

Abstrak viii

Pernyataan Integritas ix

BAB I: PENDAHULUAN 1

1. **Latar Belakang** 1

1.1. Persaingan Antar Sekolah-sekolah Swasta 3

1.2. Industrialisasi Pendidikan 5

1.3. Kemiskinan 6

1.4. Sekolah Dengan Basis Kekhasan Agama 8

1.5. Sisi Lain Dari Kebijakan Pemerintah 9

1.6. Yayasan Pengampu Sekolah dan Asrama Kristen Semarang 11

2. **Rumusan Masalah** 13

3. Pertanyaan Penelitian 14

4. Tujuan Penelitian 14

5. Manfaat Penelitian 14

6. Metode Penelitian 14

6.1. Wawancara 15

6.2. Quesioner 15

6.3. Penelitian Pustaka 15

7. Sistematika Penulisan 15

8. Landasan Teori 16

8.1. Humanisasi 17

8.2. Pendidikan Hadap Masalah 18

8.3. Dialog 18

8.4. Antidialogis dann Dialogis 19

Bab II: YPSAK DAN UPAYA MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN KRISTEN 20

©UKDW

1. Pengantar 20
2. **Profil Yayasan Pengampu Sekolah dan Asrama Kristen** 20
2.1. Dasar dan Tujuan 20
2.2. Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, dan Tenaga Kependidikan 23
2.3. Sarana dan Prasarana 25
2.4. Organisasi 25
2.5. Kurikulum 26
2.6. Pendanaan 26
2.7. Peran Serta Masyarakat 26
2.8. Keunggulan Sekolah-sekolah Masehi PSAK 27
3. Konsep Pendidikan YPSAK 27
3.1. Konsep Pendidikan 27
3.2. Visi dan Misi 30
4. Hubungan Dengan Gereja-gereja 34
4.1. Dasar Hubungan 34
4.2. Kemitraan dengan Gereja 36
5. Citra Sekolah-sekolah YPSAK di Mata Masyarakat 38
5.1. Peserta Didik 38
5.2. Orangtua Peserta Didik 40
5.3. Orangtua Kristen Lain di sekitar Sekolah-sekolah YPSAK 41
6. Konteks Pergumulan Masa Kini 44
6.1. Persaingan Antarsekolah 44
6.2. Industrialisasi Pendidikan 48
6.3. Kemiskinan 51
6.4. Sekolah Dengan Basis Kekhasan Agama 54
6.5. Kebijakan Pemerintah 56
6.6. Masalah Intern 58
7. Kesimpulan 60
7.1. Gambaran Umum tentang Jati Diri YPSAK 60
7.2. Lembaga Pendidikan Berbasis Agama Kristen 60

Bab III: PENDIDIKAN KAUM TERTINDAS 62
1. Pengantar 62
2. Perjalanan Hidup Paulo Freire 62

©UKDW

2.1. Sekilas Tentang Paulo Freire 63
2.2. Biografi 64
2.3. Karya-karya 66
3. Filsafat Pembebasan Paulo Freire 71
3.1. Pemikiran yang Revolusioner 71
3.2. Konsep Tentang Manusia 73
4. **Tema Sentral Pendidikan Bagi Kaum Tertindas** 74
4.1. Humanisasi 75
4.2. Pendidikan Hadap Masalah 78
4.3. Dialog 81
4.4. Antidialogis dan Dialogis 83
4.4.1. Teori Tindakan Antidialogis 84
4.4.2. Teori Tindakan Dialogis 85
5. Kesimpulan 88

BAB IV: ANALISIS DAN REFLEKSI 90
1. Pengantar 90
2. Analisis dan Refleksi 90
2.1. Pendidikan dengan Basis Keagamaan Sebagai Identitas 90
2.1.1. Karakter yang Didasari oleh Nilai Kasih 91
2.1.2. Mata Pelajaran Agama Kristen 93
2.2. Keberpihakan Kepada Kaum Miskin 97
2.3. Kemitraan dengan Gereja 100
3. Kesimpulan 103
3.1. Memanusiakan manusia perlu menjadi fokus utama pendidikan 103
3.2. Mata pelajaran agama Kristen berpotensi menjadi penghalang proses humanisasi 104
3.3. Upaya pembebasan dari ketertindasan harus dimulai dari kaum tertindas itu sendiri 104
3.4. Fokus pada tugas panggilan yang sama, yang diemban oleh Yayasan PSAK dan Gereja akan memperkuat hubungan kemitraan yang dibangun. 105

©UKDW

BAB V: PENUTUP 106
1. Pengantar 106
2. Rekomendasi 106
2.1. Pengadaan mata pelajaran agama selain mata pelajaran agama Kristen 106
2.2. Memanusiakan manusia sebagai fokus utama pendidikan Yayasan PSAK . . 106
2.3. Tetap memberikan keberpihakan kepada kaum miskin 107
2.4. Kemitraan dengan Gereja 107

DAFTAR PUSTAKA 108
LAMPIRAN 1: Quesioner Bagi Peserta Didik 111
LAMPIRAN 2: Wawancara Dengan Prof. Dr. Sutomo 116
LAMPIRAN 3: Wawancara Dengan Pdt. Em. Widyatmo P.H, S.Th 121
LAMPIRAN 4: Wawancara Dengan dr. Setya Pinardi 133
LAMPIRAN 5: Wawancara Dengan Pdt. Bambang Irianto, S.Th, M.Min 143
LAMPIRAN 6: Wawancacra Dengan Sophia Tri Satyawati, M.Pd 149
LAMPIRAN 7: Wawancara Dengan Bapak dan Ibu Sunaryo 159
LAMPIRAN 8: Wawancara Dengan Bapak Palwo Adi 169
LAMPIRAN 9: Wawancara Dengan Ibu Erlita Harmanto,
Ibu Helly Sutarwi dan Bp. Irvan Aryono 172

©UKDW

ABSTRAK

Dalam kurun waktu sepuluh hingga dua puluh tahun belakangan ini banyak sekolah Kristen mengalami ketertinggalan dari sekolah-sekolah lain. Tidak sedikit sekolah Kristen yang mengalami kekurangan murid dan bahkan ada yang hingga terpaksa harus menutup sekolah. Dampak dari hal tersebut membuat sekolah Kristen yang dahulu menjadi ujung tombak pelayanan Gereja dan bahkan sangat berperan dalam mencerdaskan bangsa ketika negara ini masih belum mempunyai cukup dana menjadi kehilangan gemanya. Hal tersebut disebabkan oleh banyak hal, di antaranya karena adanya persaingan antarsekolah, industrialisasi pendidikan, kemiskinan, basis keagamaan suatu sekolah, dampak dari kebijakan pemerintah, dan adanya berbagai masalah intern yang dihadapi sebuah sekolah.

Untuk membangkitkan kembali peranan sekolah-sekolah Kristen atau lembaga pendidikan Kristen agar memiliki peran kembali dalam dunia pendidikan, lembaga pendidikan Kristen perlu meninjau ulang tugas panggilannya agar menjadi relevan dengan konteks yang dihadapi dewasa ini. untuk menjadi relevan dengan konteksnya, lembaga pendidikan Kristen perlu melihat tugas panggilannya dari sudut pandang Paulo Freire yang memperkenalkan teorinya tentang pendidikan kaum tertindas. Di dalamnya sangat ditekankan agar segi-segi kemanusiaan kembali diberikan perhatian. Sebab selama ini dehumanisasi telah merampas kemanusiaan manusia sehingga kemanusiaannya menjadi tidak utuh. Dalam hal ini sekolah-sekolah Kristen agar mulai memberikan penekanan pada bagaimana lembaga pendidikan Kristen dapat mengembalikan manusia pada kemanusiaannya yang utuh dan sejati.

Kata Kunci:
sekolah Kristen, humanisasi, dehumanisasi, dialog, antidialog, kemitraan, gereja, karakter, Yayasan PSAK, tertindas, miskin, merosot, kekhasan agama, pendidikan,

©UKDW

PERNYATAAN INTEGRITAS

Penulis menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya sendiri dan sepengetahuan Penulis, tidak terdapat karya ilmiah yang sama dan diajukan untuk memperoleh gelar kepascasarjanaan di suatu perguruan tinggi, maupun karya atau pendapat yang pernah diterbitkan orang lain. Catatan dan sumber referensi yang jelas, telah dituliskan bagi setiap penggunaan pikiran atau tulisan orang lain melalui catatan kaki dan daftar pustaka.

Yogyakarta, 29 Februari 2016

Andrias Oktavianto

©UKDW

ABSTRAK

Dalam kurun waktu sepuluh hingga dua puluh tahun belakangan ini banyak sekolah Kristen mengalami ketertinggalan dari sekolah-sekolah lain. Tidak sedikit sekolah Kristen yang mengalami kekurangan murid dan bahkan ada yang hingga terpaksa harus menutup sekolah. Dampak dari hal tersebut membuat sekolah Kristen yang dahulu menjadi ujung tombak pelayanan Gereja dan bahkan sangat berperan dalam mencerdaskan bangsa ketika negara ini masih belum mempunyai cukup dana menjadi kehilangan gemanya. Hal tersebut disebabkan oleh banyak hal, di antaranya karena adanya persaingan antarsekolah, industrialisasi pendidikan, kemiskinan, basis keagamaan suatu sekolah, dampak dari kebijakan pemerintah, dan adanya berbagai masalah intern yang dihadapi sebuah sekolah.

Untuk membangkitkan kembali peranan sekolah-sekolah Kristen atau lembaga pendidikan Kristen agar memiliki peran kembali dalam dunia pendidikan, lembaga pendidikan Kristen perlu meninjau ulang tugas panggilannya agar menjadi relevan dengan konteks yang dihadapi dewasa ini. untuk menjadi relevan dengan konteksnya, lembaga pendidikan Kristen perlu melihat tugas panggilannya dari sudut pandang Paulo Freire yang memperkenalkan teorinya tentang pendidikan kaum tertindas. Di dalamnya sangat ditekankan agar segi-segi kemanusiaan kembali diberikan perhatian. Sebab selama ini dehumanisasi telah merampas kemanusiaan manusia sehingga kemanusiaannya menjadi tidak utuh. Dalam hal ini sekolah-sekolah Kristen agar mulai memberikan penekanan pada bagaimana lembaga pendidikan Kristen dapat mengembalikan manusia pada kemanusiaannya yang utuh dan sejati.

Kata Kunci:
sekolah Kristen, humanisasi, dehumanisasi, dialog, antidialog, kemitraan, gereja, karakter, Yayasan PSAK, tertindas, miskin, merosot, kekhasan agama, pendidikan,

©UKDW

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dunia pendidikan Kristen dalam kurun waktu empat belas tahun belakangan ini, yaitu sejak tahun 2001 hingga kini secara umum terus mengalami kemerosotan atau kemunduran. Indikasi ini paling tidak terlihat dalam dua lembaga yang melayani dan mengampu sekolah-sekolah Kristen, yaitu LP3S (Lembaga Perencanaan dan Pembinaan Pendidikan Sinode) Salatiga[1] dan YPSAK (Yayasan Pengampu Sekolah dan Asrama Kristen) Semarang[2]. Di kedua lembaga ini jumlah peserta didik menurun secara berarti dan disertai penutupan belasan sekolah sebagai dampaknya.

Penurunan yang signifikan terlihat dalam rentang waktu sepuluh tahun sejak tahun 2001 hingga tahun 2010. Di layanan LP3S Salatiga misalnya, jumlah peserta didik yang pada tahun 2001 berjumlah 13,598 orang merosot menjadi 6,682 orang. Selama waktu itu terdapat 17 sekolah menengah yang ditutup. Sementara di YPSAK Semarang jumlah peserta didik pada tahun 2001 yang semula berjumlah 3,483 orang menurun menjadi 1,681 orang dan disertai penutupan satu sekolah SMA.[3] Jumlah penurunan yang terjadi mencapai lebih dari separuh dari jumlah peserta didik pada tahun 2001. Jika keadaan ini terus berlangsung tanpa mendapat perhatian dan penanganan yang tepat, maka dalam jangka waktu sepuluh tahun ke depan, diperkirakan jumlah peserta didik yang ada dapat menurun separuhnya lagi dari jumlah yang tercatat pada tahun 2014 ini.

©UKDW

[1] Lembaga ini melayani sekolah-sekolah Kristen yang meliputi: SMA Kristen Pekalongan, SMA YSKI Semarang, SMA Krista Mitra, SMA Tritunggal Semarang, SMA Tugu Suharto, SMA Kristen Purwodadi, SMA Masehi Kudus, SMA BOBKRI Pati, SMA Kristen Cepu, SMA Kristen Cilacap, SMA Kristen Sidorejo Cilacap, SMA Kristen 1 Salatiga, SMA Kristen 2 Salatiga, SMA LAB Satya Wacana, SMA Kristen 1 Magelang, SMA Kristen 2 Magelang, SMA Adya Wacana Magelang, SMA Kristen Secang Magelang, SMA Bantara Wacana Muntilan, SMA BOBKRI 1 Yogyakarta, SMA BOBKRI 2 Yogyakarta, SMA BOBKRI 3 Yogyakarta, SMA BOBKRI 4 Yogyakarta, SMA BOPKRI Bantul, SMA BOPKRI Wates, SMA BOPKRI Wonogiri, SMA BOPKRI Ponjong, SMA BOBKRI Wonosari, SMA Budya Wacana 1 Yogyakarta, SMA Budya Wacana 2 Yogyakarta, SMA Kristen 1 Solo, SMA Kristen 2 Solo, SMA Widya Wacana Solo, SMA Widya Parama, SMA Manginsidi Solo, SMA Kristen Klaten, SMA Kristen Sragen, SMA Kristen Wonogiri, SMA Kristen Widodo, SMA Masehi Kebumen, SMA Kristen Purwokerto, SMA Kristen Sidorejo, SMA Kristen Wonosobo, SMA YPKSS Palembang, SMA Kristen 1 Metro dan SMA Panggung Raharjo.

[2] Lembaga ini melayani dan mengampu sekolah-sekolah Kristen yang meliputi: SMA Masehi 1 Semarang, SMA Masehi 2 Semarang, SMA Masehi 3 Semarang, SMK Masehi Ambarawa, SMP Masehi 1 Semarang, SMP Masehi 2 Semarang, SMP Masehi 3 Semarang dan SMP Masehi Ungaran

[3] Data tersebut diperoleh dari catatan yang dimiliki oleh YPSAK Semarang melalui wawancara awal bersama sekretaris yayasan tersebut pada akhir bulan Mei yang lalu.

Keadaan yang demikian secara historis amat memrihatinkan, sebab jika menilik ke belakang peran sekolah-sekolah Kristen sejak kemerdekaan amat besar pengaruhnya dalam membangun dan mencerdaskan bangsa. Weinata Sairin mengatakan dalam tulisannya bahwa: "Sekolah-sekolah Kristen sepanjang sejarahnya telah turut membentuk pola pikir, wawasan, sikap perilaku para peserta didik, sehingga ketika mereka telah menjadi pemimpin dalam suatu organisasi atau komunitas, wawasan dan kebijakan mereka amat dipengaruhi oleh proses pendidikan yang telah mereka alami di sekolah-sekolah Kristen tersebut."[4] Ini berarti pengalaman belajar selama bersekolah di sekolah Kristen telah mewarnai kehidupan setiap pribadi anak-anak bangsa dan membentuk jati diri mereka sedemikian rupa, sehingga mereka menjadi manusia-manusia dengan sumber daya berkualitas di tengah masyarakat dan dapat diandalkan.

Di samping itu, sebagai mitra pemerintah, sekolah-sekolah Kristen pada masa-masa awal kemerdekaan bersama lembaga pendidikan lain seperti Yayasan Katolik, Muhammadiyah, NU, Tamansiswa, PGRI, dan yayasan lain sejenis pernah menjadi ujung tombak negara dalam mencerdaskan bangsa, terutama ketika negara ini tidak punya cukup dana untuk itu. TEMPO.CO menegaskan hal ini dengan ungkapan: "Padahal mereka itulah yang menjadi garda depan dalam pencerdasan bangsa tatkala pemerintah belum punya dana."[5] Karena itu ketika sekolah-sekolah Kristen ini mengalami kemerosotan, Pemerintah akan kewalahan menampung peserta didik yang tak tertampung oleh lembaga pendidikan negeri.

Dari segi manajemen penyelenggaraan sekolah, menurunnya jumlah murid menjadi salah satu faktor yang memengaruhi jumlah pendapatan dan kemampuan sekolah dalam upayanya menyelenggarakan pendidikan dengan langgeng. Isjoni mengatakan: "Selagi murid-muridnya banyak dan proses pembelajaran efektif, dan masyarakat masih percaya akan kualitas sekolah yang bersangkutan, tentunya umur sekolah bisa langgeng. Akan tetapi, bila jumlah muridnya berkurang, kualitas pembelajaran rendah, banyak murid yang pindah ke sekolah lain, maka hal ini akan berdampak pada pendapatan kepada sekolah yang bersangkutan."[6] Apalagi bila pengembangan sekolah hanya didasarkan pada uang sekolah dari anak murid, tentu penyelenggaraan sekolah tidak akan bertahan lama. Karena itu berkurangnya jumlah peserta

©UKDW

[4] Weinata Sairin, "Memaknai Relasi Gereja dengan Sekolah", dalam situs *e-Artikel, Situs Artikel Indonesia* yang dikelola oleh Yayasan Lembaga SABDA yang diakses penulis pada tanggal 18 Juni 2014, pada alamat internet: http://artikel.sabda.org/memaknai_relasi_gereja_dengan_sekolah

[5] "Kebijakan Mematikan Sekolah Swasta" dalam *TEMPO.CO*, sebuah situs yang dikelola oleh PT TEMPO INTI MEDIA Tbk, dirilis pada hari Kamis, 9 Desember 2010, diakses pada hari Rabu, 18 Juni 2014 pada alamat internet: http://www.tempo.co/read/kolom/2010/12/09/283/Kebijakan-Mematikan-Sekolah-Swasta

[6] Isjoni, *Pendidikan Sebagai Investasi Masa Depan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), h. 91-92

didik yang diikuti ditutupnya sejumlah sekolah pada dua layanan yayasan pendidikan tersebut amat memrihatinkan.

Ada beberapa situasi yang menjadi faktor menurunnya sekolah-sekolah Kriaten tersebut. Beberapa faktor tersebut antara lain:

1.1. Persaingan Antarsekolah-sekolah Swasta

Dalam dunia bisnis, persaingan atau kompetisi antarperusahaan merupakan satu hal yang tidak bisa dihindarkan. Sebab pelaku pasar dalam dunia bisnis tidak boleh dimonopoli atau didominasi oleh satu perusahaan. Suatu sistem ekonomi pasar yang sehat, di dalamnya mensyaratkan adanya persaingan atau kompetisi. Sehingga dengan demikian dari sisi pelanggan, pelanggan memiliki alternatif untuk mendapatkan produk-produk yang diingainkan dengan kualitas yang baik dengan harga yang relatif terjangkau. Sedangkan dari sisi perusahaan atau produsen, persaingan mendorong kreativitas produsen untuk senantiasa melakukan inovasi dan modifikasi yang membuat produknya mempunyai nilai lebih.[7]

Penyelenggara sekolah Kristen dari kaca mata ini dapat pula dilihat sebagai produsen atau perusahaan yang bergerak dalam bidang pendidikan, meski yang dilakukan bukan sepenuhnya merupakan upaya mencari keuntungan. Sebab di balik upaya menyelenggarakan pendidikan, terdapat ideal-ideal yang hendak dicapai yang dalam hal ini terdapat muatan misi Kristiani yang hendak diwartakan sebagai wujud tanggung jawab menjadi orang-orang yang telah mendapatkan keselamatan. Oleh karena itu penyelenggaraan sekolah Kristen mau tidak mau akan bersentuhan dengan wilayah bisnis yang dalam hal ini berarti menghadapi dunia persaingan atau kompetisi.

Situasi yang demikian menjadi nyata ketika banyak Gereja dengan latar belakang denominasi yang berbeda menyadari bahwa misi Kristen dapat diwujudkan melalui dunia pendidikan dan tiap Gereja tersebut masing-masing lalu mendirikan lembaga pendidikannya sendiri. Konsekuensi atas hal tersebut adalah ada sekolah yang jumlah peserta didiknya banyak dan ada yang sedikit, ada yang diminati secara luar biasa dan ada yang peminatnya sedikit. Di antara sekolah-sekolah tersebut ada jumlah peserta didik dari latar belakang Kristen tidak begitu banyak, tetapi jumlah peserta didik dari kalangan non-Kristen lebih banyak. Hal terdapat misalnya pada YPSAK Semarang yang jumlah siswa non-Kristennya mencapai hampir sebanyak 70%.

[7] Yahya Wijaya, "Gereja dan Etika Bisnis" dalam *Merentang Sejarah, Memaknai Kemandirian: Menjadi Gereja Bagi Sesama*, Supriatno, Onesimus Dani dan Daryatno (ed.), (Jakarta: BPK Gunung Mulia dan Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan, 2009), h. 68

©UKDW

Persaingan juga semakin ketat ketika sekolah negeri meningkatkan daya tampungnya dengan menambah jumlah ruang kelas menjadi lebih banyak. Menurut publikasi yang dikeluarkan oleh BPS dalam Kota Semarang Dalam Angka 2014, terdapat 16 sekolah SMA negeri yang mengalami kenaikan dalam hal penyediaan ruang kelas. Dari yang semula berjumlah 459 pada tahun 2012 naik menjadi 518 pada tahun 2013. Sementara sebagai akibatnya jumlah ruang kelas untuk sekolah swasta yang semula berjumlah 607 pada tahun 2012 turun menjadi 574 pada tahun 2013. Jumlah sekolah swasta sendiri pun mengalami penurunan, dari yang semula berjumlah 58 sekolah menjadi 57 sekolah, yang juga berarti adanya sekolah yang tutup akibat persaingan tersebut.[8]

Melihat rasio jumlah sekolah SMA negeri dan swasta dibandingkan dengan kemampuan menampung jumlah peserta didik terlihat sangat tidak seimbang. SMA negeri yang berjumlah 16 sekolah dapat menampung peserta didik sebanyak 16.397 pada tahun 2013. Sementara sekolah swata yang berjumlah 57 hanya dapat menampung 13.008 siswa pada tahun yang sama. Ini berarti rata-rata setiap sekolah negeri dapat menampung siswa sebanyak 1024,9 siswa dalam 32,3 ruang kelas, sedangkan setiap sekolah swasta rata-rata menampung 228,3 siswa dalam 10 ruang kelas. Jika setiap tahun kecenderungan ini terus terjadi, maka sekolah-sekolah swasta akan mengalami kukurangan murid. Dampak lanjutan dari hal tersebut adalah tingkat persaingan di antara sekolah-sekolah swasta akan terjadi semakin ketat dalam mendapatkan peserta didik yang jumlahnya semakin menurun. Dari segi ini dapat dipahami mengapa setiap tahun ada sekolah swasta yang gulung tikar atau tutup dengan sendirinya.

Di antara sekolah-sekolah Kristen sendiri, persaingan atau kompetisi untuk mendapatkan peserta didik Kristen juga penuh tantangan. Karena tiap denominasi gereja mendirikan lembaga sekolah sendiri. Di samping itu dengan menyandang identitas Kristen, pangsa pasar terbesar yang diharapkan dapat ditampung adalah peserta didik yang berasal dari latar belakang Kristen. Namun ternyata tidak semua peserta didik tersebut memilih bersekolah di sekolah Kristen, sebagian memilih ke negeri dan sebagian lagi ke sekolah-sekolah Katolik.

©UKDW

[8] Penurunan jumlah sekolah SMA swasta tersebut tidak hanya terjadi dalam kurun waktu 2012-2013. Penurun jumlah sekolah swasta terus terjadi sejak tahun 2009. Tercatat menurut publikasi BPS Kota Semarang Dalam Angka Tahun 2014 berturut-turut jumlah sekolah per tahun berjumlah 65 pada tahun 2009, 61 pada tahun 2010, 60 pada tahun 2011, 58 pada tahun 2012 dan 57 pada tahun 2013. Sedangkan jumlah sekolah negeri tetap berjumlah 16 sekolah sejak tahun 2009, namun kapasitas daya tampungnya terus dinaikkan per tahun.

1.2. Industrialisasi Pendidikan

Wardiman Djojonegoro mengatakan bahwa beberapa tantangan mendasar yang memengaruhi sistem pendidikan akan dihadapi di masa depan. Di antara tantangan yang paling mendasar, ialah: (1) pentingnya orientasi nilai tambah; (2) perubahan struktur masyarakat; dan (3) pengaruh dari prioses globalisasi.[9]

Pada tantangan pertama orientasi nilai tambah sangat dibutuhkan bagi pengembangan SDM dan hal tersebut tercapai melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada tantangan kedua sebagai dampak penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadi banyak perkembangan dan kemajuan dalam sektor industri yang menyebabkan struktur masyarakat berubah dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Sedangkan pada tantangan yang ketiga proses globalisasi terjadi begitu masif dan ekstensif yang mengakibatkan batas-batas politik, ekonomi dan sosial-budaya antarbangsa seolah menjadi hilang. Dalam situasi demikian persaingan dalam banyak bidang menjadi hal yang sangat menonjol. Hanya bangsa yang unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi lah yang bisa menang dalam persaingan di era globalisasi tersebut.

Saat ini lahan pendidikan sudah dilirik oleh pengusaha-pengusaha bermodal besar yang sebelumnya bergerak di luar bidang pendidikan.[10] Hal ini tidak mengherankan, sebab sesuai tantangan-tantangan yang dihadapi, dunia pendidikan pasti akan berhadapan dengan dunia bisnis. Dalam era industri tersebut persaingan yang ketat menjadi sesuatu yang tak terhindarkan. Dalam suasana tersebut berbagai lembaga pendidikan baru bermunculan. Dengan investasi besar, mereka dapat membangun gedung yang lebih modern, perpustakaan, laboratorium dan semua fasilitas lain yang dibutuhkan dengan lengkap. Bahkan dengan promosi yang gencar lembaga pendidikan baru tersebut mampu menjual program dan memikat masyarakat untuk memilihnya.

Banyaknya lembaga pendidikan baru yang bermunculan memberikan harapan, kemungkinan dan peluang besar bagi berbagai kelompok masyarakat untuk dapat menikmati pendidikan. Sebab ketersediaannya dapat dirasakan di berbagai daerah, bahkan sampai di daerah pelosok. Namun ada hal yang kurang disadari masyarakat luas, yaitu bahwa selain usia jam terbang lembaga-lembaga pendidikan tersebut belum lama bahkan mutunya pun kadang belum teruji, masyarakat pun harus membayar mahal biaya pendidikan di lembaga pendidikan tersebut.

---

[9] Wardiman Djojonegoro, *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*, hal. 471.

[10] Imma Helianti Kusuma, "Manajemen Pendidikan di Era Reformasi" dalam *Jurnal Pendidikan Penabur - No.06/Th.V/Juni 2006*

©UKDW

Kuatnya pengusaha-pengusaha bermodal yang bermain dalam dunia pendidikan memang sangat membantu menyediakan kesempatan belajar bagi masyarakat. Namun bila mereka hanya mengejar angka-angka sebagai daya tarik, para pemodal tersebut justru dapat mengancam keberadaan lembaga pendidikan berupa kehilangan jati diri yang sebenarnya. Dalam hal ini Ainurrofig Dawam mengatakan bahwa sekolah telah menjadi agen-agen kapitalisasi, agen hegemoni, agen dominasi, agen penyebaran virus globalisasi atau bahkan agen penghancuran sebuah peradaban yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia apa pun kelasnya.[11] Sekolah juga telah kehilangan visi dan misi kemanusiaannya. Sekolah hanya bertugas menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kognitif intelektual belaka, sama sekali terlepas dari kemapuan afeksi sosial, afeksi kelembutan, afeksi *tepo sliro*, afeksi menghargai orang lain, afeksi menjunjung harkat dan martabat semua manusia.[12]

Seiring dengan hal tersebut, lembaga pendidikan yang telah lama berkiprah mulai kehilangan perhatian dan pengakuan masyarakat. Lembaga-lembaga ini adalah lembaga yang selama bertahun-tahun bertumbuh dengan modal piranti keras (kelembagaan, birokrasi, sumber daya dan dana) serba pas-pasan, tetapi semua itu diimbangi oleh modal non material (semangat, dedikasi, selain kebanggaan, gengsi lokal serta nasional, juga ilusi dan ideologi) yang tinggi.[13] Umumnya lembaga ini adalah lembaga-lembaga pendidikan yang bersifat sosial dan berbasiskan agama. Orangtua yang lebih mementingkan prestise yang berpendapat bahwa yang bermutu itu yang mahal akan mengalihkan pilihan pendidikan anak-anaknya dari lembaga jenis ini ke lembaga yang menawarkan fasilitas pendidikan yang memadai.

1.3. Kemiskinan

Kemiskinan adalah situasi konkrit yang dihadapi Gereja-gereja di Indonesia pada khususnya dan Asia pada umumnya. Angka kemiskinan Indonesia menurut Badan Pusat Statistik tahun 2013 menunjukkan bahwa masih ada sekitar 28,55 juta atau 11,47% dari 248,8 juta penduduk Indonesia yang masuk ke dalam kategori miskin yang berarti sekitar 1 dari 9 orang Indonesia adalah orang miskin. Kategori miskin itu sendiri didasarkan pada pengertian bahwa penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran

[11] Ainurrofig Dawam, *Emoh Sekolah: Menolak Komersialisasi Pendidikan dan Kanibalisme Intelektual, Menuju Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Inspeal Ahimsakarya press, 2003), hal. 51

[12] Ibid.

[13] Ariel Heryanto, "Industrialisasi Pendidikan" dalam *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan: Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi*, Sindhunata (ed), (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hal. 39

©UKDW

per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Dalam konsep BPS, garis kemiskinan terdiri atas garis kemiskinan makanan (GKM) dan non makan (GKNM) yang dihitung secara minimum.

Dampak kemiskinan itu sendiri sangat luas, tidak hanya terbatas pada si miskin itu sendiri, tetapi juga kepada orang-orang yang tergolong tidak miskin; kemiskinan bukan hanya menjadi beban pribadi, tetapi juga menjadi beban dan tanggungjawab masyarakat, negara dan dunia. Oleh karena itu Indonesia bersama 189 negara lain sejak tahun 2000 telah menyepakati sebuah deklarasi, yaitu Deklarasi Milenium atau *Millenium Development Goals* (MDGs). Salah satu agenda yang diusulkan pada tahun 2013 untuk disepakati bersama adalah agenda pembangunan pasca-2015 dengan visi untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem dalam segala bentuknya dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan meletakkan dasar-dasar kesejahteraan yang berkesinambungan bagi semua.[14]

Menurut deklarasi tersebut, masalah kemiskinan adalah masalah keadilan sosial dasar. Banyak orang yang hidup dalam kemiskinan belum mendapatkan kesempatan yang adil dalam hidup karena mereka merupakan korban dari penyakit atau pelayanan kesehatan yang buruk, tidak tersedianya lapangan kerja, bencana alam, perubahan iklim, konflik setempat, ketidakstabilan, kepemimpinan setempat yang buruk, atau pendidikan yang berkualitas rendah - atau bahkan sama sekali tidak bersekolah.[15] Rumusan penyebab kemiskinan di atas, jika mengacu pada pendapat Paul Spicker, menempatkan struktur sebagai penyebab dari kemiskinan. Di sini kemiskinan timbul dipandang sebagai akibat dari ketidakseimbangan, perbedaan status yang dibuat oleh adat istiadat, kebijakan, dan aturan lain menimbulkan perbedaan hak untuk bekerja, sekolah dan lainnya hingga menimbulkan kemiskinan di antara mereka yang statusnya rendah dan haknya terbatas.[16]

Dari kaca mata tersebut pendidikan dengan kualitas rendah disebutkan menjadi faktor penyebab dari kemiskinan. Namun berbicara mengenai hubungan antara kemiskinan dan pendidikan tidak harus dilihat dari satu sisi saja. Keduanya harus dilihat secara berkaitan, dalam pengertian bahwa pada satu sisi kemiskinan dapat menyebabkan kualitas pendidikan menjadi rendah, namun sebaliknya pada sisi lain kualitas pendidikan yang rendah pun, dapat menyebabkan kemiskinan. Dalam hal ini memang bisa terjadi karena

©UKDW

[14] United Nations, *Sebuah Kemitraan Global Yang Baru: Hapuskan Kemiskinan dan Transformasikan Ekonomi Melalui Pembangunan Berkelanjutan,* (New York: United Nations Publications, 2013), h. 9

[15] Ibid., h. 23-24

[16] Paul Spicker, *Poverty and the Welfare State: Dispelling the Myths*, (London: Catalyst, 2002), h. 16. Dalam bukunya, Spiker menjelaskan empat mashab yang sering digunakan untuk memandang penyebab kemiskinan, yaitu *Individual Explanation, Familial Explanation, Subcultural Explanation* dan *Structural Explanation*.

biaya pendidikan yang cenderung mahal menyebabkan akses pendidikan bagi masyarakat menjadi sulit. Sehingga yang dapat bersekolah hanya mereka yang tergolong mampu. Kondisi ini menyebabkan yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin. Sebaliknya, bila kondisi masyarakat tergolong miskin dan Pemerintah pun tidak mempunyai cukup dana untuk menyelenggarakan pendidikan, maka angka putus sekolah akan menjadi semakin tinggi. Dampak selanjutnya adalah sekolah tidak mampu membiayai penyelengaraan pendidikannya sehingga mutu pengajarnya tidak bisa ditingkatkan dan pengadaan sarana dan prasaranya menjadi minim. Tidak sedikit sekolah yang pada akhirnya harus tutup dengan sendirinya.

1.4. Sekolah Dengan Basis Kekhasan Agama

Pemerintah melalui Undang-undang No. 20 tahun 2003 telah memberikan kemungkinan bagi masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan. Ini tertuang dalam pasal 55 ayat satu dan dua yang berbunyi demikian: (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Pasal dan ayat-ayat tersebut memungkinkan masyarakat ikut ambil bagian dalam upaya mencerdaskan bangsa sesuai kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Namun penyelenggaraan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut harus memenuhi standar nasional pendidikan. Jika tidak, tentunya kecil kemungkinannya untuk bisa ambil bagian di dalamnya. Seiring dengan kemungkinan tersebut cukup banyak lembaga pendidikan yang didirikan dan pada umumnya berasal dari latar belakang keagamaan. Sehingga sekolah-sekolah berbasis agama muncul di banyak tempat.

Secara khusus bila sekolah tersebut dibangun berbasis agama, asumsinya adalah tentu kepentingan yang hendak dilayani secara khusus adalah masyarakat tertentu dari lingkungan agama tertentu di mana basis sekolah itu berasal. Namun Undang-undang tersebut tidak menjelaskan untuk kepentingan masyarakat tertentu yang mana. Ini berarti walaupun sebuah sekolah tertentu didirikan dengan berbasis kekhasan agama tertentu, namun kepentingannya adalah untuk melayani semua golongan masyarakat. Semua orang

©UKDW

tanpa kecuali dari latar belakang agama apa pun berhak mendapatkan pelayanan pendidikan dari sekolah yang didirikan dengan kekhasan agama tertentu.

Untuk menjamin peserta didik di sekolah-sekolah berciri khas agama yang tidak sama dengan agamanya itu pasal 12 ayat 1.a mengatakan: setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Semangat ayat tersebut adalah bahwa setiap sekolah harus memberikan pelajaran agama dan menyediakan guru agama sesuai dengan agama yang dianut murid masing-masing, tidak peduli apakah sekolah itu adalah sekolah umum atau sekolah yang berada di bawah naungan yayasan yang berbasis agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, atau Konghucu.

Di dalam pelaksanaan penerapan ayat tersebut, terlihat bahwa banyak sekolah yang tidak siap menerapkannya sehingga mencuatlah isu hak asasi manusia sebagai dampaknya. Bahkan isu-isu yang berbau SARA (suku, agama, dan ras) pun tak terhindarkan dan menyebabkan sekolah-sekolah berbasis kekhasan agama Kristen dan Katolik mengalami kekurangan murid karena isu kristenisasi dan pemurtadan. Sehingga mau tidak mau harus diakui bahwa salah satu hal yang berperan mengapa ada sekolah Kristen yang kekurangan murid dan akhirnya harus menutup penyelenggaran pendidikannya adalah hal ini.

1.5. Sisi Lain Dari Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah berkenaan dengan pendidikan, tercermin dalam empat undang-undang yang yang telah diberlakukan, yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 mengenai Penyelenggaraan Perguruan Tinggi, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kebijakan Pemerintah ini memang sangat diperlukan mengingat Pemerintah memegang otoritas dan memiliki tanggung jawab besar dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Namun dalam beberapa hal kebijakan tersebut masih memerlukan perhatian yang lebih lanjut, sebab kebijakan tersebut justru menimbulkan dampak pada lembaga pendidikan swasta. Dampak itu antara lain terlihat: *pertama*, dari segi anggaran. Ketika Pemerintah mempunyai cukup banyak anggaran untuk membangun sekolah, pada tahun 1973/1974 Pemerintah menginstruksikan mendirikan SD Inpres di semua daerah sampai ke pelosok. Hasilnya telah mampu meningkatkan angka partisipasi penduduk usia 7-12 tahun. APM (Angka Partisipasi Murid) sekolah dasar meningkat dari 58,4 persen

©UKDW

sebelum Repelita I, menjadi 93,53 persen pada akhir Repelita V dan menjadi 93,56 persen pada tahun 1994/1995.[17] Namun pendirian SD Inpres ini pada sisi lain membuat banyak SD swasta kehilangan murid dan akhirnya gulung tikar karena anak-anak usia 7-12 tahun tertampung pada sekolah-sekolah negeri.

Hal yang sama terjadi pada sekolah-sekolah lanjutan. APM penduduk usia 13-15 tahun di SLTP juga mengalami peningkatan sejak tahun 1968 sampai tahun 1994/1995, dari 17,06 persen menjadi 56,44 persen.[18] Sedangkan APM penduduk usia 16-18 tahun pada jenjang SLTA meningkat, dari hanya sebesar 8,58 persen pada tahun 1968 meningkat menjadi 36,06 persen pada tahun 1994/1995.

Berkaitan dengan tanggung jawab pendanaan, sesuai Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 49 ayat 1,[19] Pemerintah memang telah menetapkan untuk mengalokasikan dana minimal 20% dari APBN dan APBD, namun kucuran dana tersebut lebih banyak diberikan kepada sekolah-sekolah negeri. Hal ini disebabkan karena adanya dikotomi penyelenggara pendidikan yang asalnya dari Pemerintah dan masyarakat (dalam hal ini swasta). Hal ini dikuatkan oleh pasal 55 ayat 4 tentang bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah.[20] Sebagai hasilnya sekolah-sekolah negeri mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan diri menjadi RSBI/SBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional/Sekolah Bertaraf Internasional), sedangkan sekolah swasta harus hidup dari dirinya sendiri (swadana dan swakelola hingga swasembada).

Kedua secara *struktural*, sekolah-sekolah swasta dikondisikan untuk mendapatkan murid menunggu setelah penerimaan murid sekolah-sekolah negeri selesai. Kondisi ini memungkinkan sekolah-sekolah negeri mendapatkan jumlah anak yang cukup dengan kualitas yang baik dan tentu dengan sumber dana yang kuat. Sementara sekolah-sekolah swasta memiliki peluang mendapatkan murid dari jumlah murid yang tidak diterima oleh sekolah-sekolah negeri dengan kualitas dan kemampuan sumber dananya di bawah

©UKDW

[17] Wardiman Djojonegoro, *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud, 1996), hal. 372

[18] Ibid.

[19] Ayat tesebut berbunyi: "Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)."

[20] Ayat tersebut berbunyi: "Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah." Kata "dapat" pada kalimat tersebut mengandung pengertian pilihan (optional) yang dapat diartikan sebagai bisa diberikan dan bisa pula tidak diberikan. Walau pun ayat ini telah direvisi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Sidang MK, pada hari Kamis 29 September 2011 dengan keputusan mengganti kata "dapat" dengan kata "wajib", namun sosialisasi dan gemanya belum terlihat kuat dalam pengalokasian yang diberikan.

sekolah-sekolah negeri. Sehingga segmen pasar sekolah negeri dan swasta terlihat dengan jelas; sekolah negeri bagi anak yang pintar dan mampu, sedangkan sekolah swasta bagi anak yang kurang pintar dan kurang mampu.

Selain itu bagi pengembangan SDM, guru-guru sekolah-sekolah negeri mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan program sertifikasi dan diklat lebih banyak dibanding guru-guru sekolah swasta. Sebab mereka adalah guru-guru milik pemerintah, sedangkan guru-guru sekolah swasta harus menunggu bagiannya setelah semua guru-guru sekolah negeri merampungkan program sertifikasi dan diklat.

Dampak dari semua itu menjadikan pamor sekolah-sekolah swasta semakin menurun. Ada yang beranggapan bahwa sekolah swasta tidak berpihak kepada masyarakat miskin karena biaya sekolahnya terlalu tinggi. Sebagian yang lain dianggap *stagnan* dan ketinggalan zaman, karena sarana dan prasarana yang dimilikinya amat minim seperti keadaan gedung sekolah dan peralatannya. Kontribusi sekolah swasta di masyarakat mulai dipertanyakan karena lingkupnya yang eksklusif dan soliter, banyak sekolah swasta yang tutup, termasuk sekolah-sekolah perintis, seperti Perguruan Taman Siswa dan sekolah swasta berbasis keagamaan.[21]

1.6. Yayasan Pengampu Sekolah dan Asrama Kristen Semarang

Yayasan PSAK Semarang adalah sebuah lembaga pendidikan Kristen yang telah berkiprah di dunia pendidikan sejak tahun 1948. Keberadannya dimulai pada bulan Agustus 1948 saat didirikan dan dikelolanya sebuah sekolah yang bernama SMA Masehi 1. Baru pada tanggal 14 Mei tahun 1952 keberadaannya sebagai yayasan yang mengelola sekolah dan asrama Kristen secara resmi dinyatakan, yaitu saat statusnya di mata hukum disahkan sesuai dengan akta yang dikeluarkan oleh notaris.

Saat ini yayasan PSAK Semarang, yang berkedudukan di Jl. Iman Bonjol No. 138 Semarang, mengelola delapan TK, sembilan SD, empat SMP, 3 SMA dan satu SMK yang tersebar di wilayah kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Pekalongan.[22] Kekuatan SDM yang dimiliki adalah jumlah guru sebanyak 223 orang dan jumlah karyawan sebanyak 64 orang. Sedangkan jumlah murid yang dapat

[21] Putra Fajar, *Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta, Apa Bedanya?*, dalam http://putrafajar-putrafajar.blogspot.com/2011/10/sekolah-negeri-dan-sekolah-swasta-apa.html, diakses pada hari Jumat, 7 Novemver 2014.

[22] YPSAK Semarang, *Masa depan Pendidikan Kristen, Tantangan dan Peluang, Siapa yang Bertanggung Jawab? Materi Pengantar Seminar Sehari Yayasan PSAK Semarang Bersama Gereja-gereja Kristen Jawa*, (Semarang: YPSAK Semarang, 2011), hal. 8

©UKDW

dilayani sebanyak 2.449 orang. Sebagaimana lembaga pendidikan yang lain, lembaga ini pun memiliki tiga organ dalam bagan organisasinya, yaitu adanya Dewan Pembina, Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas.

Sebagaimana lembaga pendidikan Kristen lain pada umumnya, Yayasan ini dalam perjalanan pelayanannya pun mengalami pasang surut karena karena faktor-faktor eksternal dan internal. Masa keemasan dialami sejak tahun 1948 hingga tahun 1980. Kala itu hubungan dengan Belanda sebagai penyandang dana masih sangat kuat ditambah situasi kemiskinan merupakan masalah utama yang harus dientaskan lewat pendidikan, menjadikan sekolah-sekolah Kristen termasuk lembaga ini menjadi suatu lembaga pendidikan yang dicari dan dibutuhkan keberadaannya baik oleh masyarakat maupun Pemerintah.

Lalu karena faktor-faktor eksternal, pada tahun 1980-an lembaga ini mulai mengalami situasi surut yang banyak disebabkan antara lain karena Pemerintah mengambil kebijakan untuk menghentikan bantuan arus dana apa pun dari negara Belanda untuk Indonesia. Lalu pada tahun 1990-an faktor kebangkitan Islam yang mencuatkan isu kristenisasi di sekolah-sekolah Kristen dan gugatan terhadap penyelenggaraan pendidikan agama, mulai tertariknya masyarakat (pengusaha-pengusaha bermodal besar) menjadi penyelenggara pendidikan serta sekolah-sekolah negeri dari tahun ke tahun meningkatkan daya tampungnya menjadikan jumlah peserta didik yang dapat diterima semakin berkurang. Imbas dari hal tersebut adalah ditutupnya SD Masehi PSAK Demak dan SMA Masehi PSAK Ungaran.[23] Bahkan jumlah siswa dari tahun ke tahun dalam rentang waktu tahun 2002-2007 menurun drastis menjadi ± 100 siswa per tahun.[24]

Sisi internal yang juga membuat lembaga ini mengalami kemerosotan antara lain konflik internal yang menyebabkan terpecahnya kepengurusan menjadi dua kepengurusan antara kepengurusan Yayasan PSAK "Soetojo" yang beralamatkan di Jl. Dr. Cipto No. 21 Semarang dan kepengurusan Yayasan PSAK "Suratman" yang beralamatkan di Jl. Imam Bonjol No. 138 Semarang.[25] Selain itu masalah gaji pegawai yang berada di bawah standar upah minimal, status kepemilikan tanah 75% bermasalah dan 25% masa berlakunya serta

[23] YPSAK Semarang, *Dokumen 5 Y-PSAK Semarang maret 2011, Perjalanan Spiritual Yayasan PSAK Semarang*, (Semarang: YPSAK Semarang, 2011), hal. 1

[24] Ibid., hal. 4

[25] Masalah ini berakhir ketika R. Soetojo sebagai ketua Pengurus Yayasan PSAK "Soetojo" yang juga merupakan salah satu pendiri Yayasan PSAK mengundurkan diri sebagai ketua Yayasan dan membubarkan kepengurusannya serta menyerahkan Yayasan tersebut kepada Pengurus Yayasan PSAK "Suratman" pada tahun 2008.

©UKDW

tidak memiliki dana untuk menyelesaikannya, sampai tahun 2007 Pengurus Yayasan PSAK tidak memiliki perangkat lunak yang memadai sebagai standar pelayanan minimal.

Lambat namun pasti, pengurus YPSAK Semarang mulai menata diri dalam bergumul mengatasi masalah yang dihadapi tersebut. Dalam kepengurusan periode 2007-2012 ditetapkan beberapa hal berikut:

- **Visi**: Menjadi Solusi Masalah, Bukan Bagian Dari Masalah;
- **Misi**: Melakukan Kesaksian-Pelayanan yang Berkenan Di Hadapan Allah;
- **Nilai**: Bersama Tuhan Kita Bisa, Motivasi Intrinsik, Tanggung Jawab, Prinsip Kerja Dalam Tim (kepedulian sosial, kerja profesional dan bersinergi).

Dengan dasar visi, misi dan nilai-nilai tersebut, YPSAK Semarang mulai mengimplementasikan kasih, mengatasi permasalahan internal, mengatasi masalah aset, pemeliharaan status pemilikan tanah, meningkatkan profesioanalitas sumber daya manusia, pemeliharaan aset gedung dan pemeliharaan sarana-prasarana. Hasil dari penerapan visi, misi dan nilai-nilai tersebut memperlihatkan bahwa ketika kemampuan pembiayaan terdampak karena PPDBB dari tahun ke tahun menurun dan para pegawai menjadi panik melihat YPSAK Semarang nyaris tenggelam, mereka justru akhirnya dapat melihat adanya banyak mujizat yang terjadi. Pada bagian penutup buku Dokumen 5 Y-PSAK Semarang, Perjalanan Spiritual Yayasan PSAK Semarang dikatakan bahwa "Banyak hal yang kami lihat sebagai suatu kemustahilan, namun mujizat itu memang nyata. Buktinya, banyak pekerjaan Tuhan yang kami pikir itu mustahil, namun kenyataannya yang mustahil itu nyata-nyata terwujud".[26]

2. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang di atas, terlihat bahwa pada umumnya sekolah-sekolah Kristen mengalami kemerosotan yang cukup berarti paling tidak sejak empat belas tahun belakangan ini karena banyak faktor. Lambat laun satu per satu dari sekolah-sekolah Kristen tersebut mulai kekurangan murid bahkan tidak sedikit yang terpaksa harus menutup sekolahnya. Pamor yang dulu bersinar sebagai sekolah unggulan dengan banyak kelebihan sekarang semakin redup. Dulu terkenal dan mendapat pengakuan oleh masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan yang dapat diandalkan, sekarang justru mulai kehilangan perhatian dan pengakuan masyarakat. Namun sekolah-sekolah dalam naungan Yayasan PSAK cenderung lebih stabil dan lebih dapat bertahan dalam menyelenggarakan usaha pendidikan dibanding sekolah-sekolah lain yang

[26] Yayasan PSAK Semarang, *Dokumen 5 Y-PSAK Semarang maret 2011, Perjalanan Spiritual Yayasan PSAK Semarang,* h. 22

©UKDW

sejenis. Oleh karena itu dalam penelitian ini rumusan masalah yang dapat Penulis rumuskan adalah hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk membangkitkan kembali peran lembaga pendidikan Kristen dalam dunia pendidikan melalui penyelenggaraan pendidikan yang dikelola oleh Yayasan PSAK Semarang.

3. PERTANYAAN PENELITIAN

Pertanyaan penelitian yang hendak dibangun untuk menjawab persoalan tersebut adalah bagaimana Yayasan PSAK Semarang mengupayakan lembaga pendidikan ini tetap dapat menyelenggarakan usaha pendidikan di tengah berbagai situasi yang membuat banyak sekolah Kristen lain semakin kehilangan daya saing dan akhirnya terpaksa harus berhenti menyelenggarakan usaha pendidikannya?

4. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Mencari dan menemukan hal-hal apa saja yang membuat Yayasan PSAK dan sekolah-sekolah yang diampunya tetap dapat menyelenggarakan usaha pendidikan di tengah persaingan ketat yang terjadi saat ini.
b. Menyoroti sejumlah tema yang membuat Yayasan PSAK dan sekolah-sekolah yang diampunya tetap dapat menyelenggarakan usaha pendidikan di tengah persaingan ketat yang terjadi saat ini dari teori Paulo Freire tentang pendidikan kaum tertindas.

5. MANFAAT PENELITIAN

a. Memunculkan kesadaran kepada lembaga-lembaga pendidikan Kristen akan keunggulan lembaga tersebut sebagai hal yang dapat ditawarkan dalam upaya ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai sebuah lembaga Kristen.
b. Memperkaya pengetahuan tentang bagaimana sebuah lembaga pendidikan Kristen dapat bertahan dalam menyelenggarakan pendidikan di tengah situasi merosotnya dunia pendidikan Kristen.

6. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif maupun kualitatif. Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mendapatkan data adalah: mengumpulkan data di lapangan dengan menggali informasi tentang bagaimana YPSAK Semarang menyelenggarakan pendidikan sebagai lembaga Kristen di tengah

©UKDW

tantangan semakin merosotnya dunia pendidikan Kristen. Unit penelitiannya adalah para pengambil kebijakan di lingkungan YPSAK Semarang (Dewan Pembina, Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas), para guru dan murid beserta orangtuanya ditambah sejumlah tokoh masyarakat yang dipandang perlu dan memiliki kaitan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Dalam upaya mendapatkan data untuk penelitian, beberapa langkah berikut akan ditempuh, yaitu:

6.1. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada tokoh-tokoh yang berperan dan terlibat langsung pada unit-unit penelitian di atas dalam upaya pengembangan sekolah Kristen dalam lingkup YPSAK Semarang serta beberapa tokoh lain di luar YPSAK yang dianggap memiliki relevansi dalam penelitian ini.

6.2. Quesioner

Quesioner dibagikan kepada para responden, terutama kepada responden yang jumlahnya cukup banyak. Dalam hal ini responden tersebut adalah para siswa.

6.3. Penelitian Pustaka

Kepustakaan yang akan dikumpulkan adalah dokumen-dokumen yang dimiliki oleh YPSAK Semarang berkenaan dengan sejarah, laporan-laporan tahunan serta dokumen-dokumen lain yang terkait di dalamnya. Literatur-literatur tentang konsep pendidikan kaum tertindas Paulo Freire akan didalami dalam rangka melihat sumbangannya dalam penyelengaraan pendidikan Kristen dalam konteks yang dihadapi YPSAK.

7. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan hasil penelitian akan dirumuskan dalam kerangka sistematika sebagai berikut:

Bab I

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metodologi penelitian, sistematika penelitian dan kerangka teoritik.

Bab II

Bab ini berisi tentang Yayasan PSAK dan upaya menyelenggarakan pendidikan sebagai lembaga pendidikan Kristen. Di dalamnya Penulis memaparkan hasil penelitian yang dilakukan pada Yayasan Pengampu Sekolah dan Asrama Kristen Masehi tentang upaya menyelenggarakan pendidikan sebagai lembaga pendidikan Kristen di tengah pergumulan yang dihadapi berkenaan dengan kecenderungan merosotnya banyak sekolah Kristen. Dalam

©UKDW

menuangkan hasil penelitian tersebut, pertama-tama Penulis menguraikan profil Yayasan ini, lalu konsep pendidikan yang dimiliki, hubungan yang dibangun dengan Gereja, citra lembaga ini di mata masyarakat, konteks pergumulan yang dihadapi saat ini, diakhiri dengan kesimpulan.

Bab III

Bab ini berisi landasan teori yang Penulis gunakan untuk menyoroti hasil penelitian di Yayasan Pengampu Sekolah dan Asrama Kristen (YPSAK) Masehi Semarang. Di dalamnya Penulis menguraikan pemikiran Paulo Freire tentang pendidikan bagi kaum tertindas berturut-turut dimulai terlebih dahulu dengan mengangkat perjalanan hidupnya, konsep pendidikan yang dimiliki Freire, tema-tema sentral yang terkandung dalam pemikiran Freire tentang pendidikan bagi kaum tertindas, dan pada bagian akhir berisi kesimpulan atas uraian yang tertuang pada bagian bab tersebut.

Bab IV

Bab ini berisi analisis atas penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan PSAK Semarang dan refleksi atasnya dari sudut pandang pemikiran Faulo Freire. Beberapa tema pokok yang menonjol akan dianalisis dan direfleksikan. Beberapa tema tersebut adalah, pertama, tentang ciri khas keagamaan lembaga pendidikan Yayasan PSAK yang di dalamnya mencakup tentang pendidikan karakter yang dijiwai oleh kasih dan adanya mata pelajaran agama Kristen. Kedua, tentang mata pelajaran agama Kristen sebagai satu-satunya mata pelajaran agama yang diajarkan di sekolah Kristen. Ketiga, tentang keberpihakan terhadap kaum miskin. Keempat, tentang hubungan kemitraan antara Yayasan PSAK dengan Gereja. Lalu diakhiri dengan kesimpulan.

Bab V

Bab ini berisi rekomendasi dan saran bagi YPSAK Semarang khususnya dan Lembaga-lembaga Pendidikan Kristen pada umumnya dalam menyelenggarakan pendidikan sebagai lembaga Kristen dalam dunia pendidikan.

8. LANDASAN TEORI

Landasan teori yang Penulis gunakan untuk menyoroti upaya penyelenggaraan pendidikan Kristen yang dilakukan oleh Yayasan PSAK adalah teori Paulo Freire tentang pendidikan kaum tertindas. Adapun pemilihan pemikiran Paulo Freire tentang pendidikan kaum

©UKDW

tertindas yang digunakan untuk menyoroti upaya penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh YPSAK ini didasarkan pada beberapa hal. Pertama, adanya unsur ketidakadilan dan penindasan yang bersifat struktural yang dihadapi oleh sekolah-sekolah Kristen. Kedua, kemiskinan merupakan atmospher dan pergumulan utama yang dihadapi setiap hari dalam penyelenggaraan pendidikan di dalamnya. Ketiga, memanusiakan manusia adalah upaya yang ditawarkan YPSAK dalam rangka membangun keunggulan sekolah.

Situasi utama yang menjadi keprihatinan Freire adalah situasi penindasan. Sebab, apa pun namanya, penindasan selalu menunjuk pada adanya harkat martabat manusia yang tidak diperlakukan dengan semestinya. Bagi kaum tertindas maupun yang menindas, ini berarti mereka kehilangan kesempatan untuk hidup secara manusiawi, sebagai manusia yang seutuhnya. Karena itu memanusiakan kembali manusia merupakan sebuah tugas panggilan yang mendesak untuk dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut, Freire menyajikan sejumlah gagasan dalam beberapa tema di bawah ini dengan harapan agar kaum tertindas mengalami pembebasan dari situasi tertindas.

8.1. Humanisasi

Freire mengatakan bahwa dalam sejarah, dalam konteks yang konkrit dan obyektif, baik masalah humanisasi maupun dehumanisasi keduanya merupakan kemungkinan yang selalu tersedia bagi seseorang sebagai mahluk belum selesai yang menyadari ketidaksempurnaannya.[27] Ini menegaskan bahwa setiap orang akan selalu berada pada kemungkinan untuk memilih berada pada proses humanisasi atau dehumanisasi. Jika yang dipilih adalah humanisasi, maka seseorang akan berproses menuju pada kemanusiaannya yang sejati, yang utuh. Oleh Freire kemanusiaan yang demikian disebut pula sebagai "manusia baru", yaitu manusia yang merdeka.[28] Sedangkan jika yang dipilih adalah dehumanisasi, maka seseorang akan berada pada sebuah penyimpangan dari proses humanisasi yang mengarahkan manusia menjadi mahluk yang tidak lagi utuh dan tidak lagi sejati, yaitu pada suatu keadaan yang tidak manusiawi.

Atas pilihan tersebut, jika seseorang harus memilih, maka pilihan harus dijatuhkan pada humanisasi, sebab menurut Freire humanisasi adalah sebuah panggilan.[29] Disebut

[27] Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas*, (Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia, 2008), hal. 11

[28] Ibid., hal. 15

[29] Paulo Freire, *Pedagogy of the oppressed, 30th anniversary ed*, (New York-London: The Continuum International Publishing Group, 2000), hal. 43.

Buku terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh LP3ES menerjemahkan kata 'vocation' sebagai 'fitrah'. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fitrah memiliki makna sebagai sifat asal; kesucian; bakat; pembawaan. Dalam pengertian ini, humanisasi lalu diartikan sebagai sifat asali atau bakat atau pembawaan.

©UKDW

panggilan, karena manusia yang diciptakan tersebut, diciptakan dalam keadaan belum selesai, belum sempurna dan harus terus berproses untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Maka untuk merealisasikan hal tersebut, humanisasi adalah pilihan yang perlu ditempuh dan diperjuangkan.

8.2. Pendidikan Hadap Masalah

Dalam upaya membangun manusia menuju pada kemanusiaannya yang utuh dibutuhkan sistem pendidikan yang tepat, yang tidak melayani kepentingan golongan penindas, yaitu sebuah sistem pendidikan yang sungguh-sungguh manusiawi. Untuk itu Freire menciptakan sebuah alternatif sistem pendidikan baru bagi kaum tertindas, yaitu sistem pendidikan yang dinamakan problem-posing education atau sistem pendidikan hadap masalah yang dapat menjamin terwujudnya pendidikan yang membebaskan. Sistem baru tersebut oleh Freire dimaksudkan untuk mengganti sistem pendidikan gaya lama yang selama ini digunakan. Sistem pendidikan gaya lama, yang oleh Freire disebut dengan sistem pendidikan gaya bank, memiliki acuan-acuan yang akan melestarikan penindasan yang dengan demikian membuat proses dehumanisasi akan terus berkembang.

8.3. Dialog

Dalam upaya menemukan kembali harkat kemanusiaan manusia agar sungguh-sungguh menjadi manusiawi dalam upaya humanisasi, telah ditekankan bahwa dialog merupakan jalan yang mutlak ditempuh sejak awal. Pentingnya dialog ini menurut Freire disebabkan karena di dalam dialog tersebut manusia memperoleh maknanya sebagai manusia.[30] Karena itu, dialog merupakan kebutuhan yang eksistensial. Karena itu pula dialog tidak boleh dimengerti hanya sebatas pada tindakan seseorang yang "menabungkan" gagasannya kepada orang lain atau sekadar sebagai sebuah gagasan yang dapat dipertukarkan seseorang dalam sebuah ajang diskusi atau bahkan sebagai bentuk pemaksaan kebenaran terhadap orang lain, dan akhirnya dialog tidak boleh digunakan dengan mengatasnamakan orang lain. Dialog memiliki makna yang lebih mendalam dari hal-hal tersebut.

Dialog memiliki hakikat pada istilah yang disebut sebagai "kata", yang di dalam "kata" tersebut terpadu dua dimensi yang amat penting, yaitu refleksi dan tindakan.

Menurut Penulis kata 'panggilan' lebih mendekati kata yang tertulis dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Sebab menurut Freire, kodrat atau fitrah manusia adalah sebagai mahluk yang diciptakan dalam keadaan belum selesai, yang menyadari ketidaksempurnaannya. Maka agar manusia dapat sampai pada keadaan 'selesai' dan 'sempurna' sebagai manusia, tidak ada jalan lain kecuali menempuh jalan humanisasi. Inilah panggilan manusia.

[30] Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas*, hal. 77

©UKDW

Keduanya terpadu dalam suatu interaksi yang sangat mendasar hingga bila salah satunya dikorbankan - meskipun hanya sebagian - seketika itu yang lain dirugikan.[31] Bila dalam "kata" itu dimensi tindakannya ditiadakan misalnya, maka "kata" tersebut akan berubah menjadi sebuah verbalisme atau hanya sebagai omong kosong atau bualan semata. Sebaliknya jika yang dihilangkan adalah dimensi refleksinya, maka "kata" tersebut akan berubah menjadi aktivisme. Dikotomi atas keduanya dalam keadaan apapun akan membuat "kata" tersebut menjadi tidak otentik dan tidak mampu mengubah realitas, yaitu dunia.

8.4. Antidialogis dan Dialogis

Di bagian akhir bukunya, Freire menganalisis teori-teori aksi kebudayaan yang berkembang dari matriks antidialogis dan dialogis untuk mengembangkan masalah maupun untuk menjelaskan penegasan-penegasan baru. Sebagai proposisi umum dalam mengawali analisisnya tentang antidialogis dan dialogis, Freire menegaskan bahwa manusia dan binatang memiliki perbedaan yang mendasar. Manusia adalah makhluk praksis sedangkan binatang adalah makhluk yang hanya sekadar berbuat.[32] Binatang tidak memikirkan dunia; mereka tenggelam di dalamnya. Sedangkan manusia muncul dari dunia, mengenalinya, dan dengan cara itu dapat memahami dan mengubah dunia dalam karya mereka. Dengan menegaskan perbedaan manusia dan binatang tersebut, Freire hendak menekankan kemampuan manusia dalam berpraksis yang tidak boleh didikotomikan dengan membaginya menjadi tahap awal berupa refleksi serta tahap selanjutnya berupa tindakan. Bagi Freire refleksi dan tindakan harus terjadi secara serentak.

Menjelaskan hal tersebut, Freire menggambarkannya dengan contoh revolusi yang sering dibuat menjadi suatu dikotomi antara elite penguasa yang berpikir dan yang merencanakan sedangkan rakyat berfungsi sebagai pelaksana keputusan para pemimpin. Jika hal ini yang terjadi, maka ini disebut sebagai antidialogis karena pola tersebut melestarikan parktek dominasi atas yang lain. Praksis revolusi yang sejati harus bersifat dialogis, yang merupakan suatu kesatuan antara elite penguasa yang memimpin dan rakyat yang dipimpin. Dialog dengan rakyat sangat diperlukan dalam setiap revolusi yang sejati. Karena itu revolusi sangat berbeda sifatnya dengan kudeta militer. Sebab orang tidak dapat mengharapkan dialog dalam kudeta militer. Yang ada hanya pembohongan (untuk memperoleh "legitimasi") atau kekuatan (untuk menindas).[33]

[31] Ibid., hal. 75
[32] Ibid., hal. 130
[33] Ibid., hal. 134

©UKDW

BAB V

PENUTUP

1. PENGANTAR

Pada bab terakhir sebagai penutup, Penulis menyampaikan rekomendasi kepada Yayasan PSAK sebagai penyelenggara pendidikan Kristen untuk terus mengembangkan diri dalam rangka ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dengan jati dirinya sebagai lembaga pendidikan yang berbasis agama Kristen.

2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian yang Penulis lakukan dalam tesis ini, Penulis menyampaikan beberapa hal sebagai rekomendasi kepada pihak Yayasan PSAK sebagai penyelenggara pendidikan yang berbasiskan pada agama Kristen. Rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

2.1. Pengadaan mata pelajaran agama selain mata pelajaran agama Kristen

Yayasan PSAK sebagai lembaga pendidikan yang telah berkiprah dalam pelayanan di dunia pendidikan sejak tahun 1952 telah banyak memberikan sumbangan kepada masyarakat luas. Amat disadari bahwa konteks zaman yang dihadapi terus mengalami perubahan yang cukup berarti. Agar pelayanan pendidikan yang diberikan saat ini dan ke depan nantinya tetap menjadi pelayanan yang relevan dengan zamannya, Yayasan PSAK perlu memaknai dengan cara baru panggilannya tersebut. Secara konkrit, jika selama ini mata pelajaran agama Kristen dimaknai sebagai ciri khas dari lembaga pendidikan ini yang harus diajarkan kepada semua peserta didik tanpa kecuali, maka ke depan demi mengingat pentingnya pendidikan yang mendukung proses humanisasi Yayasan PSAK perlu mempertimbangkan pengadaan mata pelajaran lain sesuai agama yang dimiliki peserta didiknya.

2.2. Memanusiakan manusia sebagai fokus utama pendidikan Yayasan PSAK

Jika selama ini sekolah-sekolah yang diampu oleh Yayasan PSAK telah memberikan fokus perhatian kepada upaya memanusiakan manusia dan ternyata justru inilah yang membuat lembaga pendidikan ini dipandang dan diakui keberadaannya sebagai lembaga pendidikan Kristen yang dapat memberi sumbangan pada pembentukan karakter peserta didik yang memiliki kedisiplinan, perilaku yang berbudi luhur, kesetiaan, maka

©UKDW

Penulis merekomendasikan untuk tetap terus mempertahankan hal tersebut. Bahkan tidak hanya itu, Penulis menyarankan agar hal tersebut lebih ditingkatkan lagi dengan berbagai metode yang ada. Terlebih dengan adanya fasilitas asrama yang dimiliki, asrama tersebut dapat dimanfaatkan bagi jalan pembentukan karakter yang efektif. Serupa dengan pondok pesantren yang dimiliki teman-teman dari latar belakang Muslim.

2.3. Tetap memberikan keberpihakan kepada kaum miskin

Mayoritas peserta didik yang dilayani oleh Yayasan PSAK berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah dan lebih banyak pada golongan yang berada di bawah. Di satu sisi ini dapat memperlamban gerak pelayanan pendidikan, namun di sisi lain juga merupakan potensi yang dengannya Yayasan PSAK bersama dengan sekolah-sekolah yang diampunya dapat merealisasikan perjuangan untuk proses humanisasi, yaitu upaya perjuangan untuk memanusiakan manusia. Di sini lah Yayasan PSAK dapat menunjukkan keberpihakannya kepada warga miskin dan yang tersisih sebagaimana yang telah dilakukan Kristus sendiri.

Memang upaya tersebut tergolong tidak mudah, sebab membutuhkan banyak biaya. Namun dengan pengalaman bagaimana mendapatkan donatur selama ini memperlihatkan bahwa kemungkinan itu masih terbuka lebar. Kemungkinan bekerja sama dengan yayasan yang memiliki keprihatinan terhadap masalah sosial dengan visi yang sama masih bisa dimaksimalkan. Apalagi dengan kemitraan dengan Gereja justru akan memperkokoh upaya tersebut. Demikian pula dengan kebijakan Pemerintah yang dari waktu ke waktu senantiasa dikembangkan demi majunya dunia pendidikan di Indonesia.

2.4. Kemitraan dengan Gereja

Hubungan yang terbangun dengan Gereja selama ini belum terbangun dengan maksimal. Sebab jumlah Gereja yang secara nyata ikut berpartisipasi dalam upaya penyelenggaraan pendidikan di Yayasan PSAK belum begitu banyak. Dari jumlah Gereja di tiga klasis Gereja-gereja Kristen Jawa hanya beberapa yang secara rutin dan teratur ikut terlibat memberikan dukungan berupa dana dan perhatian. Penulis mendukung upaya pembangunan relasi yang telah dilakukan oleh Yayasan PSAK agar ke depan upaya tersebut semakin terlihat buahnya berupa keterpaduan dalam kerja sama yang indah dalam upaya humanisasi di bidang pendidikan.

©UKDW

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Banawiratma, J.B., "Hidup Menggereja yang Terbuka: Jaringan dari berbagai Macam Kominitas Basis Kontekstual, dalam *Gereja Indonesia, Quo Vadis? Hidup Menggereja Kontekstual*, J.B. Banawiratma (Eds), (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000)

Boehlke, Robet R., *Sejarah Perkembangan Pikiran dan Praktek Pendidikan Agama Kristen: dari Plato sampai Ignatius Loyola*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1991)

Collins, Denis E., *Paulo Freire: His Life, Works and Thought*, (New York: Paulist Press, 1977)

Dawam, Ainrrofig, *Emoh Sekolah: Menolak Komersialisasi Pendidikan dan Kanibalisme Intelektual, Menuju Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Inspeal Ahimsakarya Press, 2003)

Djojonegoro, Wardiman, *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud, 1996)

Elias, John L., "Pulo Freire: Religious Educator" dalam *Religious Education: The official journal of the Religious Education Association Volume LXXI No. 1 January-February 1976*

Freire, Paulo, *Pendidikan Kaum Tertindas*, (Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia, 2008)

Freire, Paulo, *Pendidikan Masyarakat Kota*, terjemaahan Agung Prihantoro, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003)

Freire, Paulo, *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan*, terjemahan Agung Prihantoro dan Fuad Arif Fudiyartanto, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999)

Freire,Paulo, *Peagogy of the oppressed, 30th anniversary ed*, (New York-London: The Continuum International Publishing Group, 2000)

Gadotti, Moacir, *Reading Paulo Freire: His Life and Work*, (SUNY series, Teacher Empowerment and School Reform), translated by John Milton, (United States of America: State University of New York Press, Albany, 1994)

Pokok-pokok Ajaran GKJ, (Salatiga: Sinode GKJ, 2005)

Heryanto, Ariel, "Industrialisasi Pendidikan" dalam *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan: Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi*, Sindhunata (ed), (Yogyakarta: Kanisius, 2000)

©UKDW

Isjoni, *Pendidkan Sebagai Investasi Masa Depan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006)

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Paparan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan tentang Implementasi Kurikulum 2013 dan Relevansinya dengan Kebutuhan Kualifikasi Kompetensi Lulusan*, tahun 2013.

Kusuma, Imma Helianti, "Manajemen Pendidikan di Era Reformasi" dalam *Jurnal Pendidikan Penabur - No.06/Th.V/Juni 2006*

Naomi, Omi Inta, (ed), *Menggugat Pendidikan: Fundamentalis, Konservatis, Liberal, Anarkis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)

Palmer, Joy A., (d), *50 Pemikir Pendidikan dari Piaget sampai Masa Sekarang*, (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2003)

Ringkasan Laporan Penelitian Problematika Pendidikan Agama: Penelitian di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA di Kota Jogjakarta 2004-2006

Roberts, Peter, *Education, Literacy, and Humanization: Exploring the Work of Paulo Freire*, (United States of America: Bergin & Garvey, 2000)

Sairin, Weinata, "Ciri Khas dan Pendidikan Agama di Sekolah Kristen: Merumuskan dan Mendefinisikan Sikap Menyongsong Masa Depan", dalam *Identitas dan Cri Khas Pendidikan Kristen di Indonesia, Antara Konseptual dan Operasional*, ed. Weinata Sairin, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, cet. 3, 2006)

Spicker, Paul, *Poverty And The Welfare State: Dispelling The Myths*, (London: Catalyst, 2002)

Subagi, L., "Kritik atas Konsientisasi dan Pendidikan: Teropong Paulo Freire dan Ivan Illich" dalam *Pendidikan Manusia*, Martin Sardi (ed.), (Bandung: Penerbit Alumni, 1985)

Torrance, ThoasF., *The School of Faith: The Catechisms of Reformed Church*, (London: James Clarke & Co Limited, 1959)

Sebuah Kemitraan Global Yang Baru: Hapuskan Kemiskinan dan Transformasikan Ekonomi Melalui Pembangunan Berkelanjutan, (New York: United Nations Publications, 2013)

Widyatmadja, Josef P., *Diakonia Sebagai Misi Gereja: Praksis dan Refleksi Diakonia Transformatif*, Judith Liem dan JB. Banawiratma (Eds), (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009)

Wijaya, Yahya, Gereja dan Etika Bisnis" dalam *Merentang Sejarah, Memaknai Kemandirian: Menjadi Gereja Bagi Sesama*, Supriatno, Onesimus Dani dan Daryatno (ed.), (Jakarta: BPK Gunung Mulia dan Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan, 2009)

Yewangoe, Andreas A., "Pendidikan Kristiani: Konsep dan Aplikasinya" dalam *Jurnal Pendidikan Penabur - No. 04 / Th. IV / Juli 2005*,

©UKDW

Dokumen 5 Y-PSAK Semarang Maret 2011, Perjalanan Spiritual Yayasan PSAK Semarang, (Semarang: YPSAK Semarang, 2011)

Masa depan Pendidikan Kristen, Tantangan dan Peluang, Siapa yang Bertanggung Jawab? Materi Pengantar Seminar Sehari Yayasan PSAK Semarang bersama Gereja-gereja Kristen Jawa, (Semarang: YPSAK Semarang, 2011)

Dokumen 5 Y-PSAK Semarang: Perjalanan Spiritual Yayasan PSAK Semarang, (YPSAK: Maret 2011)

Internet

"Kebijakan Mematikan Sekolah Swasta" dalam *TEMPO.CO*, sebuah situs yang dikelola oleh PT TEMPO INTI MEDIA Tbk, dirilis pada hari Kamis, 9 Desember 2010, diakses pada hari Rabu, 18 Juni 2014 pada alamat internet: http://www.tempo.co/read/kolom/2010/12/09/283/Kebijakan-Mematikan-Sekolah-Swasta

Fajar, Putra, *Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta, Apa Bedanya?*, dalam http://putrafajar-putrafajar.blogspot.com/2011/10/sekolah-negeri-dan-sekolah-swasta-apa.html, diakses pada hari Jumat, 7 Novemver 2014.

Oktaviano, Donald, *Driyarkara: Pendidikan Sebagai Pemanusiaan Manusia Muda*, dalam alamat internet http://kampusbebeck.blogspot.co.id/2012/06/normal0falsefalsefalseenusxnone.html yang diakses pada tanggal 13 Januari 2016.

Sairin, Weinata, *Memaknai Relasi Gereja dengan Sekolah*, dalam e-artikel: Situs Kristen Indonesia, diakses pada 27 Oktober 2015 pada url http://artikel.sabda.org/memaknai_relasi_gereja_dengan_sekolah

SuaraMerdeka.com, *Arron Juara Satu OSTN Matematika Non Teknologi* diakses pada tanggal 4 Nopember 2015 pukul 13:49 WIB pada alamat http://berita.suaramerdeka.com/arron-juara-satu-ostn-matematika-non-teknologi/

©UKDW